

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200
- Adrian Sutedi, op.cit, hlm 190. (instruksi presiden No,1 tahun 1983 dan No, 1 tahun 1989).
- Amin rahman, 2008 (Jurnal), *Akuntabilitas dan Transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah.*
- Daniel Aditya Utama, Rediana Setiyani, 2014 (Jurnal). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan tanggungjawab pengelolaan keuangan.*
- Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah:Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2009 ), 23.
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 14.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 289-290.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik,Konsep,Dimensi dan indikator Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media Anggota IKAPI DIY,2018)
- Webster international dictionary. Massachussets: Merriam company
- Lijan Poltak Sinambela dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik :Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 45.
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government (Mewirauahakan Birokrasi)*. PPM Jakarta 2003
- Fitzsimmons, James A and Mona J. Fitzsimmons. 2001. *Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology*. Third Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co. E-Book.

Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006 (Jurnal). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tirta N. Murshitama, 2012 (Jurnal), *Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan sistem transparansi nasional pelayanan publik*.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2. 2

3 Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18 4

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan Metode R & D)*. Bandung: Alfabeta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar transparansi pelayanan publik

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2017 Tentang perubahan Nomenklatur Dinas Penataan Ruang sudah tidak lagi menangani proses pelayanan perizinan IMB

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat.

**Internet**

(<http://kamusbahasaIndonesia.org/pelayanan>) diakses pada 27 Mei 2020

Website Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Website Dinas Penataan Ruang

Makassarkota.bps.go.id.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN SATU PINTU  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8 Telpn 0411-436 488  
MAKASSAR 90144

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 412 / DPMPSTP / VI / 2020

Yang Bertanda Tandan dibawah ini :

Nama : **NUR INTAN ABDULLAH, SE,MM**  
NIP : 19700730 200112 2 001  
Pangkat /Gol : Penata TK.I / III.d  
Jabatan : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Moch. Dienul Fajry Kadir  
NIM : E051171001 / Universitas Hasanuddin  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melaksanakan **PENELITIAN** pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Juni 2020

An. KEPALA DINAS  
Subbagian Umum dan Kepegawaian



**NUR INTAN ABDULLAH, SE,MM**

PANGKAT : PENATA TK.I

NIP : 19700730 200112 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**DINAS PENATAAN RUANG**

Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Makassar 90144  
☎ (0411) 435-550 Fax : (0411)436-567 ✉ distaru.mks@gmail.com



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 047/271/Distaru/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ANDI APRIADY, SH., MH**  
NIP : 19640421 198510 1 001  
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I / IV-b  
Jabatan : Plt. DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MOCH. DIENUL FAJRY KADIR**  
Nim/ Jurusan : E051171001 / Ilmu Pemerintahan  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS  
Judul : "TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN (IMB) DI KOTA MAKASSAR".

Telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Juli 2020  
Plt. KEPALA DINAS

**ANDI APRIADY, SH., MH**

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19640421 198510 1 001



Distaru\_mks



Distaru Kota Makassar



Distaru\_mks





**Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Belakang Teknis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Makassar**



**Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi Tata ruang  
dan Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar**



**Wawancara dengan Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan  
Dinas Penataan Ruang Kota Makassar**



**Wawancara Kepala Bidang Pelayanan Depan Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.**



**Bidang Pelayanan Depan DPM-PTSP Kota Makassar**







**Sarana dan Prasarana DPM-PTSP Kota Makassar**



**Penertiban bangunan yang tidak sesuai izin di jl. Landak baru yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar**